

PERAN PEMERINTAH DALAM MENANGGULANGI KERUSAKAN INFRASTRUKTUR JALAN DI KABUPATEN BONE

Nilawati^{1*}, Abdul Mahsyar², Muhammad Tahir³

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

The purpose of this study was to describe the role of government in overcoming damage to road infrastructure in Bone regency. The method of this study used descriptive qualitative. The number of informants were 4 people. The result of this study showed that the role of government had performed its duties and responsibilities as an organizer policy. And in the provision of government facilities, it needed to review location so that the government knew the needs.. but in a large project or development.. it was hard for the regional government or related agencies to give authority to their work partners then the work partner who would be responsible for the provision of facilities. The regional government or related agencies continued to carry out their supervision and could not be separated responsible.

Keywords: *government role, road infrastructure damage*

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan bagaimana Peran Pemerintah dalam Menanggulangi Kerusakan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Bone. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Jumlah informan dalam penelitian ini terdapat 4 orang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah sepanjang ini telah melaksanakan atau melakukan tugas dan tanggungjawabnya sebagai penyelenggara kebijakan. Dan dalam penyediaan fasilitas pemerintah terlebih dahulu melakukan tinjauan lokasi agar dapat dilihat kebutuhannya namun dalam proyek besar atau pembangunan yang berat pemerintah daerah atau dinas terkait memberikan wewenang kepada rekanan kerjanya kemudian rekanan kerja yang akan bertanggung jawab dalam hal penyediaan fasilitas. akan tetapi pemerintah daerah atau dinas terkait tetap melakukan pengawasannya dan tidak lepas tanggung jawab.

Kata Kunci: peran pemerintah, kerusakan infrastruktur jalan

* nilawati@gmail.com

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan suatu proses pembaharuan yang kontinu dan terus menerus dari suatu keadaan tertentu yang dianggap lebih baik. Dan di negara-negara baru berkembang usaha pembaharuan ini. Pada umumnya dilakukan dengan peranan pemerintah yang aktif dan dengan usaha secara berencana. Pembangunan yang meliputi segala segi kehidupan politik, ekonomi, dan social budaya itu akan baru berhasil, apabila merupakan kegiatan yang melibatkan partisipasi dari seluruh rakyat didalam suatu negara. Tidak saja dari pengambilan kebijaksanaan tertinggi, perencanaan pemimpin, pelaksanaan tetapi juga dari golongan yang kecil dan lain-lain. Administrasi pembangunan tidak hanya berarti kemampuan untuk menetapkan strategi pembangunan yang baik, kemudian diperinci dalam rencana-rencana dan diterjemahkan dalam kegiatan-kegiatan nyata yang efektif dalam pelaksanaan pemerintah, tetapi juga hendaknya dapat menimbulkan respon dan kerja sama seluruh rakyat. Pada umumnya di negara-negara baru berkembang tugas-tugas yang diperluas tersebut diterima sebagai tugas pemerintah dalam rangka mencapai

tujuan kesejahteraan yang meningkat dan terlaksananya pembangunan.

Administrasi pembangunan terdiri dari 2(dua) pengertian yaitu, administrasi dan pembangunan. secara umum administrasi adalah proses kerja sama antara satu orang atau lebih dalam sebuah wadah untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan pembangunan adalah suatu proses perubahan yang mencakup seluruh sistem social yang mengenai sistem politik, infrastuktur, sistem ekonomi, dan sumber daya. Jadi administrasi pembangunan adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem social yang mengenai sistem politik, infrastruktur maupun ekonomi.

Menurut Siagian (Tjokroamidjojo, 1974:13) Administrasi Pembangunan adalah adalah keseluruhan proses daripada rangkaian kegiatan yang bersifat pertumbuhan dan perubahan yang berencana menuju modernitas dalam berbagai aspek kehidupan dala, rangka “*national building*”. Menurut Mustopadidjaja (1976), administrasi pembangunan adalah “ilmu dan seni” tentang pembangunan suatu sistem administrasi tersebut mampu menyelenggarakan berbagai fungsi umum pemerintah dan pembangunan secara efisien dan efektif. Menurut J..B Kristiadi (1998), admistrasi

pembangunan adalah administrasi negara yang mampu mendorong kearah proses perubahan, pembaharuan dan penyusaian serta serta pendukung serta perencanaan. Dalam rangka memperkembangkan perubahan-perubahan kearah keadaan yang lebih baik yaitu pembangunan. Seringkali peranan pemerintah dilaksanakan atas dasar cara yang berencana.. perencanaan dipakai sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan perubahan masyarakat tersebut secara lebih baik

Tidak lepas dari pada tingkat campur tangan pemerintah dalam makin lama makin banyak juga. Bahkan baagi negara-negara yang menganut kebebasan dan inisiaif usaha swasta yang besar, telah pula kelihatan meluasnya tugas baru dinas-dinas pemerintahan yang melayani kepentingan umum, yaitu mengatur, mendorong, ,mengkordinir. Dalam hal ini suatu pemerintah mempunyai wewenang tersendiri untuk menentukan kebijakan yang akan di terapkan dalam implementasinya di masyarakat. Harapan demi harapan yang dibangun oleh masyarakat terkait dengan permasalahan infrastruktur membuat pemerintah kabupaten Bone harus secara tepat memutuskan dan mengambil keputusan yang tidak

hanyaa menguntungkan satu pihak, namun menguntungkan segala pihak.

Dengan adanya hal tersebut yang di dasari dengan peraturan perundang-undangan yang tertera pada Undang-undang nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan yang menjelaskan bahwa jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam pengembanagan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah negara, dan fungsi masyarakat serta dalam memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Jalan juga sebagai bagian system transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosal dan budaya serta lingkungan dan di kembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah, membentuk dan memperkuat kesatuan nasional untuk menetapkan pertahanan dan keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional. Dimana Jalan raya merupakan infrastruktur penting yang menunjang berbagai kegiatan masyarakat, terutama

kegiatan transportasi. Kerusakan jalan raya tak biasa dilepaskan dari kebijakan publik yang dijalankan oleh pemerintah terkait.

Dalam peraturan daerah kabupaten Bone nomor 2 tahun 2013 tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten Bone yang menjelaskan bahwa untuk mengarahkan pembangunan di kabupaten Bone dengan pemanfaatan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun rencana tata ruang wilayah. Dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.

Peran merupakan tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa menurut Poerwodarminta (1995: 571). Sedangkan Menurut Merton (dalam Raho, 2007: 67) mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang-orang yang menduduki status tertentu. Dari kedua

pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa peran adalah suatu tindakan atau perilaku yang harus dilakukan seseorang dalam suatu peristiwa. Selanjutnya menurut Levinso (Sukanto, 2009:213) mengatakan peranan mencakup tiga hal yaitu: 1) peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Dalam arti ini peranan adalah serangkaian peraturan-peraturan yang mendasari seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. 2) peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam kehidupan bermasyarakat. 3) peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku yang penting bagi struktur social masyarakat.

Sedangkan pemerintah disini adalah hakikatnya untuk mengatur dan melayani. Dapat dijelaskan bahwa pemerintah hadir karena adanya suatu komitmen Bersama yang terjadi antara pemerintah dengan rakyatnya sebagai pihak yang diperintah dalam suatu posisi dan peran, yang mana komitmen tersebut hanya dapat dipegang apabila rakyat dapat merasa bahwa pemerintah itu memang diperlukan untuk melindungi, memberdayakan dan mensejahterakan rakyat.. menurut Ndraha (2000:70) mengatakan bahwa

pemerintah mengatakan bahwa pemerintah memegang pertanggung jawaban atas kepentingan rakyat. Kembali mengatakan bahwa semua beban yang memproduksi, mendistribusikan, atau menjual alat pemenuhan kebutuhan masyarakat berbentuk jasa public dan layanan civil. Dengan begitu tugas pemerintah harus memikul beban berat dan tanggung jawab yang besar untuk mensejahterakan rakyatnya. Pengertian pemerintah dilihat dari sifatnya yaitu pemerintah dalam arti luas yaitu semua kekuasaan yang ada di legislative, eksekutif, dan yudikatif. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit hanya mendapatkan satu kekuasaan yaitu eksekutif (W. Riswan Tjandra 2009:197). Secara etimologi, Inu Kencana Syafie (2013:4), menjelaskan bahwa pemerintahan dan pemerintah dapat diartikan sebagai berikut: a). Pemerintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh, yang berarti di dalamnya terdapat dua pihak, yaitu pemerintah memiliki wewenang yang diperintah memiliki kepatuhan akan keharusan. b). Setelah di tambah awalan “pe” menjadi pemerintah, yang berarti badan yang melekuakan kekuasaan memerintah. c). Setelah ditambah lagi akhiran “an” menjadi pemerintahan, berarti pembuatan, cara hal atau urusan dari badan yang

memerintah tersebut. Pemerintah modern dewasa ini Rasyid membagi fungsi pemerintah menjadi empat bagian, yaitu pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan pengaturan. Dengan mengutip Franklin D. Roosevelt, Rasyid mengemukakan bahwa untuk mengetahui suatu masyarakat lihatlah pemerintahannya. (Muhadam Labolo 2014:34). Sadu Wasistiono (Subejo 2013) salah satu tugas pemerintah yang penting adalah memberikan pelayanan umum kepada masyarakat, oleh karena itu organisasi pemerintah sering pula disebut pelayanan masyarakat. Soewargono (1996:1) dan Djohan (1998:161) menyatakan bahwa salah satu fungsi utama dari pemerintah yaitu membuat kebijakan public. Argumentasi penting dalam hal ini adalah bahwa semua warga negara akan senantiasa bersentuhan dengan kebijakan public yang dikeluarkan oleh pemerintah karena yang diatur oleh kebijakan public tentunya yang menyangkut kepentingan umum. Jadi peran pemerintah menurut Siagian (2000: 142-150) yaitu pemerintah memainkan peranan yang dominan dalam proses pembangunan. Peran yang disoroti adalah sebagai stabilisator, inovator, modernisator, dan pelaksana sendiri dalam kegiatan pembangunan. Dari uraian diatas dapat diketahui

bahwa peran pemerintahlah yang sangat berpengaruh penting dalam sebuah pembangunan demi kelancaran dan kesejahteraan rakyat.

Menurut Munir (2010:19) peranan pemerintah sesuai dengan fungsinya, yaitu: a) *Entrepreneur*, artinya pemerintah daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan usaha dalam mengelola aset-aset daerah sumber daya ekonomi potensial, sehingga secara ekonomi menguntungkan dan memberi manfaat bagi masyarakat. b) *kordinator*, sebagai *kordiotor* pemerintah dapat menetapkan kebijaksanaan atau strategi bagi pembangunan daerah dan merangkul semua komponen-komponen masyarakat untuk menjadi aktor dalam. c) *fasilitator*, sebagai *fasilitator* pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan *attitudional*, yaitu berkaitan dengan perbaikan prosedur perizinan dan pelayanan serta melakukan penetapan daerah untuk memantapkan pengaturan dimensi *special* dalam pembangunan.

Dengan adanya hasil penelitian yang terkait dengan penelitian ini tentang peran pemerintah kota Serang dalam pelayanan infrastruktur dengan studi kasus mengenai kerusakan jalan ciwaru raya yang mengemukakan

bahwa realita yang terjadi mengenai kebijakan pemerintah kota Serang atas pemulihan infrastruktur serta sarana dan prasarana yang tersedia untuk public ini menjadi suatu permasalahan yang berat, karena bisa menimbulkan asumsi masyarakat yang menganggap bahwa pemerintah kota Serang tidak bisa membuat kebijakan yang mensejahterakan rakyatnya. Tulisan ini dimulai dari kegundahan atas perkembangan mengenai tindak lanjut infrastruktur yang rusak di kota Serang umumnya, dan di jalan ciwaru raya khususnya. Asumsi yang terbentuk seolah-olah pemerintah tidak berperan aktif dalam menanggulangi permasalahan infrastruktur jalan ciwaru raya yang menimbulkan pertanyaan. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu pencairan secara intensif melalui prosedur kualitatif dalam pengumpulan mengenai pernyataan pernyataan yang tersip dalam suatu dokumen publik, analisis dan interpersif data, serta penulisan hasil penelitian. Pengambilan sampel secara sengaja, seperti wawancara, pengumpulan data terbuka, serta interpretasi pribadi atas temuan-temuan yang ada dalam lapangan. Lalu data yang terkumpul dihadirkan kembali secara kronologis untuk melihat peran

pemerintah kota Serang dan akaibat atas segala permasalahan yang ada. Usaha ini dilakukan untuk melihat bagaimana respon masyarakat atas peran pemerintah, mengenai keterlibatan atau ketidakadilan pemerintah atas pelayanan infrastruktur yang masih dibawa standar. Maka dari itu pemerintah bertugas dan harus bertanggung jawab dalam penyediaan sarana dan prasana untuk rakyatnya.

Kerusakan jalan menjadi pemandangan biasa di daerah ini. Kerusakan jalan tak hanya terjadi di pelosok desa, tapi juga di wilayah kota.. Penelusuran RADAR BONE, kerusakan jalan dijumpai di beberapa titik dalam kota, diantaranya Jl Jenderal Sudirman, Jl Sambaloge, Jl Pinra, Jl Agussalim, Jl Menuju Stadion, Jl Reformasi (Depan kantor DPRD), Jl A Pangeran Pettarani, Jl Abu Daeng Pasolong, Poros Lona Rilau, Poros Panyili dan Jl A Celleng.

“Sudah ada beberapa pengendara motor yang jatuh karena menghindari jalan yang berlubang,” ungkap salah seorang warga di sekitar Stadion Lapatau. Warga tersebut menilai langkah pemerintah daerah dalam hal ini Dinas PU dan Penataan Ruang dalam melakukan penanganan sekadarnya saja. Pasalnya, jalan yang berlubang hanya ditutupi tanah sehingga tidak bertahan lama. “Bagaimana

caranya jalan bisa bagus kalau ditimbun tanah saja. Kalau hujan hanyut semua lagi, jadi kembali berlubang,”

Jalan rusak kini menjadi makanan sehari-hari masyarakat kabupaten Bone. Jalan rusak dan berlobang menyebabkan banyak sekali terjadi kecelakaan lalu lintas hingga merenggut nyawa orang. Yang memiriskan disepanjang jalan rusak, anggaran yang tersedia untuk pembangunan jalan cukup minim. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Bone, untuk tahun 2019, program pengaspalan jalan hanya sepanjang 18 km. Ini terbagi atas pengaspalan jalan yang dibiayai dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp32 miliar sepanjang 12,6 kilometer. Kemudian pembangunan jalan yang bersumber dana alokasi umum (DAU) sepanjang 5,5 kilometer dengan jumlah anggaran hanya Rp11 miliar. Terkhusus pembangunan jalan yang dibiayai melalui DAK dipusatkan di poros Lamurukung-Lapuse, poros Telle-Taretta, Welado-Opo dan Usa-Cumpiga. Sedangkan pembangunan jalan yang dibiayai DAU dipusatkan di poros Libureng-Packing, Kahu-Palattae, Sanrego, Patimpeng, Desa Hulo Kecamatan Kahu, Bontocani, Taka Kecamatan Bengo, Pasaka Kecamatan Ajangale. Jl Stadion dalam dan poros

Panyili. Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bone, Jibang mengatakan pengaspalan tahun ini minim. Masing-masing lokasi yang dibiayai dana DAU rata-rata cuma sepanjang 500 meter. Bahkan ada hanya 300 meter per titik. “Padahal kami mengusulkan anggaran untuk DAK sebesar Rp250 miliar, sedangkan yang terealisasi hanya Rp32 miliar. Kemudian DAU kami usulkan 1,79 triliun untuk kebutuhan setiap tahun sedangkan yang direalisasikan hanya Rp11 miliar. Makanya masih banyak jalan rusak yang belum bisa tersentuh tahun ini,” kata Jibang. Jibang mencontohkan ruas jalan yang belum bisa ditangani tahun ini, yakni di Tellu Limpoe khususnya di Tapong, Bontocani tersebar di beberapa titik, Cenrana, Ajangale, dan Kahu ada beberapa ruas jalan sulit dilewati kendaraan. Bahkan masih banyak jalanan yang dekat dari kota tidak pernah tersentuh aspal seperti di Desa Kanco dan Ajangpulu Kecamatan Cina sekira 6 km.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan mengambil

lokasi di kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Bone. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah dalam menanggulangi kerusakan infrastruktur jalan di Kabupaten Bone.

Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian fenomenologi yaitu penelitian pengumpulan data dengan wawancara dan data secara tertulis hal ini dibuat agar tujuan dari penelitian bisa akurat dengan apa yang terjadi di lapangan dan apa yang tertuang pada dokumen kemudian selanjutnya dengan observasi.

Teknik pengumpulan data dalam yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1) Observasi yaitu pengamatan langsung di lokasi penelitian yang difokuskan pada pengamatan langsung terhadap masalah yang akan diteliti. 2) Wawancara, disini peneliti dan informan dengan responden bertatap muka secara langsung untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan maksud data yang dapat dijelaskan masalah penelitian peran pemerintah dalam menanggulangi kerusakan infrastruktur jalan di Kabupaten Bone. 3) Media Reviu melakukan reviu terhadap pemberitaan, baik cetak maupun online yang berkaitan dengan peran pemerintah dalam menanggulangi kerusakan infrastruktur jalan.

Informan dalam penelitian ini diharapkan memberikan data secara obyektif, akurat, serta dapat dipertanggung jawabkan yang diberikan kepada peneliti. Dalam penentuan informan peneliti menggunakan metode *purposive sampling* yaitu penentuan orang mengerti dan terlibat langsung dengan permasalahan peneliti.

Sumber data primer yaitu: 1) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone, 2) Staf kepala seksi bagaian jalan dan jembatan, 3) Tokoh masyarakat. Sedangkan data sekunder yaitu data-data yang berkaitan dengan peran pemerintah dalam menaggulangi kerusakan jalan di kabupaten Bone.

Data yang diperoleh selanjutnya di analisis dengan tehnik analisis data kualitatif, secara terinci sistematis dan terus menerus yang meliputi langkah-langkah sebagai berikut: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian. Adapun keabsahan data yang digunakan adalah tringulasi sumber, tehnik, dan waktu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Bone adalah salah satu daerah otonom di Provinsi Sulawesi Selatan. Indonesia. Ibu kota

Kabupaten ini terletak di kota Watampone. Berdasarkan data kabupaten Bone dalam Angka Tahun 2015 yang diterbitkan oleh badan pusat statistic Kabupaten Bone, jumlah penduduk kabupaten Bone Tahun 2015 adalah 738.515 jiwa, terdiri atas 352.081 laki-laki dan 386.434 perempuan. Dengan luas wilayah Kabupaten Bone sekitar 4.559 km² persegi, rata-rata tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Bone adalah 162 jiwa per km².

Kabupaten Bone sebagai salah satu daerah yang berada dipesisir timur Sulawesi selatan memiliki posisi strategis dalam perdagangan barang dan jasa di Kawasan timur Indonesia yang secara administratif terdiri dari 27 kecamatan, 333 desa dan 39 kelurahan. Kabupaten ini terletak 174 km ke arah timur kota makassar, berada pada posisi 4°13'-5°6' LS dan antara 119°42'-120°30'BT.

“terwujudnya masyarakat Kabupaten Bone yang Maju, Mandiri, Demokratis, dan Beradab.

Misi: Untuk mewujudkan visi daerah ke depan dengan ciri kondisi, kehidupan yang diinginkan, ditetapkan misi sebagai berikut: 1). Pengamalan Pancasila secara konsisten yang dijiwai nilai-nilai moral dan etika agama dalam masyarakat , berbangsa dan beragama. 2) Penguatan daya saing dan

peningkatan kualitas produk unggulan daerah untuk mengurangi ketergantungan dalam upaya pembangunan daerah. 3) Mendorong dan mengembangkan kehidupan dan mekanisme politik daerah yang sehat di dukung partisipasi aktif seluruh masyarakat dan Lembaga-lembaga swadaya masyarakat. 4) Penguatan kelembagaan dan pengembangan hubungan Lembaga legislative dan eksekutif yang efektif dan fungsional. 5).Mengupayakan peningkatan pendapatan rata-rata masyarakat dan penduduk diatas tingkat pemenuhan kebutuhan dasar manusia. 6). Melaksanakan ketertiban guna terciptanya kondisi yang kondusif bagi pengembangan aktifitas perekonomian dan social lainnya, sehingga mendukung peningkatan kualitas kesejahteraan segenap lapisan masyarakat dan daerah. 7). Mengupayakan penciptaan perumbuhan ekonomi antar wilayah dalam daerah secara bersinergi fungsional sesuai spesifikasi potensi wilayah masing-masing untuk menguatkan peran daerah sebagai pusat pelayanan dan pengembangan Kawasan Timur Sulawesi selatan. 8).Mengupayakan penciptaan kehidupan masyarakat yang aman, damai dan tentram dalam persamaan dan perbedaan yang

ditimbulkan oleh pemahaman nilai-nilai moral dan etika agama. 9)Mewujudkan penegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia berlandaskan keadilan dan kebenaran.

Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone terletak di wilayah Kabupaten Bone tepatnya di jalan laksamana Yos Sudarso Watampone Kabupaten Bone. Kedinasan ini memiliki tugas sebagai penyelenggaraan urusan pemerintah bidang pekerjaan umum, pembangunan infrastruktur dan perumahan untuk daerah kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Terkait dengan wewenang tersebut, maka melalui kantor ini beberapa surat perizinan di proses. Beberapa surat tersebut seperti Izin Pemanfaatan Ruang dan Izin Mendirikan Bangunan. Melalui kedinasan ini pula urusan pembebasan lahan proyek infrastruktur pemerintah dilakukan.

Tugas pokok dan fungsi umum Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang adalah melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, yang menjadikan kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Melaksanakan kebijakan pelanyelenggaraan urusan pemerintah bidang pekerjaan umum dan penataan

ruang. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan terkait dengan urusan pemerintah dinas pekerjaan umum dan penataan ruang. Penyusunan program dan anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Pelaksanaan program dan anggaran Pengoordinasian tugas-tugas pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Penyusunan bahan dokumentasi dan statistik, peraturan perundang-undangan, pengelolaan bahan bacaan dan penyelenggaraan kemitraan dengan masyarakat. Penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja kepada kepala dinas. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga Penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan Pelaksanaan pembinaan ASN di lingkungan dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Dalam kantor Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang terdapat susunan organisasi terdiri dari: a. Kepala Dinas, b) Sekretaris Dinas, c) Bidang Bina Teknik, d) Bidang Jalan dan Jembatan, e) Bidang Penataan Ruang, f) Bidang Prasarana, g) UPTD,

h) Kelompok jabatan pelaksana dan jembatan fungsional.

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting untuk mempercepat proses pembangunan nasional. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Menurut Prof.Dr.Sunyoto Usman berpendapat bahwa infrstruktur sangat penting dalam menyediakan pelayanan untuk mendukung pembangunan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup. Dalam Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang jalan, dijelaskan bahwa peran infrastruktur jalan adalah sebagai bagian prasarana transportasi yang mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Selanjutnya, selain sebagai prasarana prasarana bagi distribusi barang dan jasa juga merupakan urat nadi bagi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Kualitas infrastruktur, baik yang keras fisik (jalan, pelabuhan, irigasi), keras nonfisik (telepon, internet, listrik, air) ia memainkan peran vital karena merupakan penggerak perekonomian. Dimana disini Infrastruktur

berhubungan dengan tiga hal (Hartanto,2004) pertama, dukungan dasar bagi pengembangan pabrik/industri, misalnya, listrik, jalan dan jaringan telekomunikasi. Kedua, biaya produksi dan distribusi, baik bahan baku dan produk jadi. Ketiga, keterkaitan dengan pasar dan proses pemasaran.

Untuk yang lebih jelas penyediaan infrastruktur terhadap pembangunan ekonomi adalah terdiri dari sebagai berikut: 1)mempercepat dan menyediakan barang-barang yang dibutuhkan, 2) tersedianya infrastruktur akan memungkinkan tersedianya barang-barang kebutuhan masyarakat dengan biaya lebih murah, 3) infrastruktur yang baik dapat memperlancar transportasi yang pada gilirannya merangsang adanya stabilitasasi dan mengurangi disparitas harga antar daerah, 4) infrastruktur yang memperlancar jasa transportasi menyebabkan hasil produksi daerah dapat diangkut dan dijual kepasar (Basri, 2002) Menurut World Bank kaitan infrastruktur jalan dengan biaya transportasi yaitu apabila kualitas infrastruktur jalan suatu daerah buruk maka akan mengakibatkan kenaikan biaya transportasi sehingga menurunkan daya saing produk-produk daerah

tersebut dibanding produk daerah yang lain.

Dalam hal ini penulis ingin mengetahui bagaimana pemerintah berperan dalam menanggulangi kerusakan infrastruktur jalan di Kabupaten Bone. Dimana peran pemerintah adalah sebagai penjaga keamanan, ketertiban, dan pengembangan. Tetapi kemudian terdapat pula suatu cara dalam pelaksanaan pereanan pemerintah yang memberikan kepada pemerintah sebagai pendorong inisiatif usaha pembaharuan dan pembangunan perangkat. Peranan pemerintah lebih sebagai pelayan masyarakat yang tidak bertujuan memperoleh keuntungan atau profit, sehingga haruslah, dimana lebih mementingkan terpenuhinya kepuasan pelanggan dan bukan memenuhi apa yang menjadi kemauan birokrasi itu sendiri.

Menurut Awaloeddin (Tjokroamidjojo,1974: 18) klasifikasi pertama dalam cara pelaksanaan peranan pemerintah, yaitu: a). Fungsi pengaturan, dalam hal ini dapat di sub-klasifisir: penentuan kebijakan, pemberian pengarahan dan bimbingan, pengaturan melalui perizinan, dan pengawasan.b). pemilikan sendiri dari pada usaha-usaha ekonomi atau social yang penyelenggaraannya dapat

dilakukan sendiri atau oleh swasta.c). penyelenggaraan sendiri dan berbagai kegiatan- kegiatan ekonomi social.

Klasifikasi lain dari cara pelaksanaan peranan pemerintah ini dapat dikatakan pula fikiran dari Irving Swerdlow(Tjokroamidjojo, 1974:18), yang menyebutkan bahwa campur tangan pemerintah dalam proses perklembangan kegiatan masyarakat (jika lebih positif merupakan proses pembangunan), dan dapat dilakukan dengan lima cara:a). Operasi langsung (*operation*) pada pokoknya pemerintah menjalankan sendiri kegiatan-kegiatan tertentu.b). Pengendalian langsung (*direct control*) penggunaan perizinan, lisensi (untuk kredit, kegiatan ekonomi lain), penjatahan dan lain-lain. Ini dilakukan oleh badan-badan pemerintah yang “*action laden*” (yang berkewenangan dalam berbagai perizinan, alokasi, tarif dan lain-lain) atau kalau tidak, berusaha untuk menjadi action laden.c). Pengendalian tak langsung (*indirect control*) cara dengan memberikan pengaturan dan syarat-syarat, misalnya pengaturan penggunaan dana devisa tertentu diperbolehkan asal untuk daftar barang tertentu.d). Pemengaruhan langsung (*direct influence*) disini dilakukan caraa persuasive dan nasehat, misalnya saja supaya golongan masyarakat tertentu

dapat turut menghubungkan diri dalam koperasi tertentu, atau ikut jadi akseptor program keluarga berencana. e). Pemengaruhan tak langsung (*indirect influence*) ini adalah bentuk involvetment yang paling ringan, misalnya hanya memberikan informasi, menjelaskan kebijaksanaan. Contoh-contoh teladan tentang efisiensi dan ketidak borosan. Apalagi misalnya penyuluhan dan pembinaan untuk lebih menerima hal-hal yang baru.

Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa peran pemerintah semakin lama semakin berat dan memiliki tanggung jawab yang lebih berat dalam melaksanakan tugasnya sebagai mana mestinya demi mensejahterkan rakyat dan ketertiban.

Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Bone memiliki peran penting dalam hal pembangunan infrastruktur jalan di kabupaten Bone dan memberikan pembangunan terbaik kepada masyarakat dan melakukan pembangunan secara merata di kabupaten Bone. Penulis akan membahas bagaimana peran pemerintah sesuai dengan fungsinya, yaitu: (1) Enterpreneur, (2) Kordinator, (3) Fasilitator. Adapun penjelasan secara rinci mengenai hal tersebut:

Entrepreneur

Adalah peran pemerintah harus lebih bertanggung jawab dalam melaksankan usaha-usaha dalam pengelolaan sumber daya dalam menanggulangi kerusakan infrastruktur jalan di kabupaten Bone. Dalam hal tersebut pemerintah Kabupaten Bone terkait dengan Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama ini sudah melaksanakan dan selalu melakukan tugas dan kewajibannya sebagai penyelenggara. Namun jalan yang ada di Kabupaten Bone tidak semua menjadi tanggung jawab pemerintah daerah tetapi tetap dilakukan pengawasan oleh pemerintah daerah. Karena jalan yang ada di Kabupaten Bone penanganannya berbeda-beda dan kerusakan jalan itu terbagi-bagi jenis kerusakannya, jadi penanganannya dilihat dari jenis kerusakannya.

Kordinator

Adalah peran pemerintah dalam membuat kebijaksanaan pembangunan, agar para masyarakat ikut terlibat dalam pembangunan infrastruktur jalan di kabupaten Bone. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Bone dapat dilihat saat diadakan musyrembang karena dengan adanya

kegiatan musyrembang masyarakat dapat memasukan usulan-usulan atau saran-saran yang dapat menambah wawasan.

Fasilitator

Adalah peran pemerintah lebih memperhatikan penyediaan dalam maksud memberikan fasilitas yang sewajarnya agar pemerintah daerah mempercepat pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Bone. Dalam penyediaan fasilitas pembangunan dapat dilihat terdahulu pembangunan seperti apa yang akan dikerjakan karena dalam pembangunan infrastruktur jalan berbeda-beda penanganannya, maka dari itu dikenali dahulu pembangunannya kemudian disediakan fasilitasnya yang dibutuhkan. Namun dalam pembangunan yang proyek yang besar dapat menggunakan rekanan kerja atau orang ketiga dalam pembangunan. Dan rekanan kerja yang akan melakukan pengawasan dan penyediaan fasilitas yang dibutuhkan di lokasi proyek tersebut.

Faktor yang menjadi penghambat dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Bone adalah keterbatasannya anggaran atau dana yang tersedia sedangkan pembangunan yang akan dilakukan cukup besar dan

luas dengan keterbatasan anggaran yang tersedia jadi pembangunan tidak lancar. Namun yang menjadi factor pendukung dalam pembangunan adalah keadaan ekonomi atau kesiapan masyarakat dilokasi pembangunan.

Dengan adanya kerusakan jalan seperti dapat menghambat perjalanan dan dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas, diharapkan pemerintah daerah atau dinas terkait untuk segera menindak lanjuti hal tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peran Pemerintah dalam Menanggulangi Kerusakan Infrastruktur jalan di kabupaten Bone dapat di simpulkan bahwa Peran Pemerintah dalam Menanggulangi Kerusakan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Bone secara Umum dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik hanya saja masih ditemukan beberapa kendala yang menjadi penghambat.. peran pemerintah semakin lama semakin berat dalam melaksanakan tugas sebagai penjaga ketertiban dan perkembangan. Dengan menggunakan beberapa peranan pemerintah sesuai dengan fungsinya namun terdapat beberapa kekurangan yang harus diminimalisir lagi agar dalam pembangunan bisa terjadi secara

merata. Adapun faktor yang menjadi penghambat dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Bone yaitu adanya ketersediaan dana atau anggaran yang cukup minim disisi lain perbaikan jalan di kabupaten besar. Sedangkan yang menjadi faktor pendukung adalah adanya ketaatan warga masyarakat dalam menggunakan jalan. Sedangkan saran kami adalah Diharapkan pimpinan dan stakeholder terkait dalam meningkatkan atensinya terhadap Peran Pemerintah dalam Menanggulangi Kerusakan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Bone. kemudian untuk pegawai yang di bidang jalan lebih memperhatikan hal-hal yang mengutamakan potensi pembangunan jalan yang baik secara merata. Untuk pemerintah daerah agar kiranya lebih meningkatkan kinerjanya dan tetap memelihara dalam pertanggung jawabnya dalam melaksanakan usaha dalam mengelola aset-aset daerah sumber daya ekonomi potensial, sehingga secara ekonomi menguntungkan dan memberi manfaat bagi masyarakat, dan sebagai kordinator pemerintah dapat menetapkan kebijaksanaan atau strategi bagi daerah dan merangkul semua komponen masyarakat untuk menjadi aktor dalam pembanguana dan tetap menyediakan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan.

Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sekiranya untuk memelihara kedisiplinan dan aturan waktu yang telah ditetapkan guna untuk mendapatkan kualitas pegawai yang berpotensi. Dilihat dari luasnya wilayah Kabupaten Bone diharapkan untuk Dinas terkait untuk lebih memperhatikan pembangunan-pembangunan yang dapat mengembangkan pemekaran Bone.

DAFTAR PUSTAKA

- J.B Kristiadi. 1997. Perspektif Administrasi Publik Menghadapi Abad 21.
- Labolo, Muhadam. 2010. *System Pemerintah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Lepi Ratnasari, 2017. Peran pemerintah kota Serang dalam pelayanan Infarastruktur. *Prosiding seminar nasional Pendidikan*, 211
- Munir, Fuady. 2010. *Konsep Negara Demokrasi*. Bandung. Refika Aditama.
- Ndraha, taliziduhu, 2000. *Ilmu pemerintahan*. Jakarta. Rineka cipta
- Poerwadarminata, W.J.S. 1995. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: PT. Balai Pustaka
- Siagian, P Sondang. 2000. Manajemen Sumber Daya manusia.. Jakarta: Bumi Aksara
- Siagian P Sondang. 2003. Administrasi Pembangunan: Konsep Dimensi dan Strateginya, Bumi Aksara. Jakarta
- Subejo. 2013. *Pembangunan Pertanian dan Perdesaan*. Bunga Rampai
- Soekanto,soerjono, 2009. *Sosiologi suatu pengantar.jakarta*. P.T. Raja Grafindo
- Syafie, Inu Kencana. 2013. *Ilmu Pemerintahan Edisi Revisi Kedua*. Bandung. Rajawali Pers.
- Syafie, Inu Kencana. 2013. *Ilmu Pemrintahan*. Jakarta. Bumi Aksara
- Tjandra, Riswan, W. 2009. *Peradilan Tata Usaha Negara, Mendorong terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Beribawa*. Jogjakarta: Universitas Atma Jaya.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1974. *Pengantar administrasi pembangunan*. Jakarta. LP3ES
- Tjokromidjojo, Bintoro. 1971. *Administrasi pembangunan dan Aspek administrasi dalam pelaksanaan Pembangunan*. Jakarta. Paper.
- Tjokroamidjojo, Bintoro, 1992. *Perencanaan pembangunan*. Jakarta. CV Haji Masagung
- Raho, Bernard. 2007, *teori sosiologi modern*. Jakarta. Prestasi pustakaraya

Undang-undang

- Peraturan daerah Kabupaten Bone nomor 2 Tahun 2013 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bone
- Undang-undang nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan